



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, ANGGARAN DAN
PENERIMAAN APBD TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
(STUDI EMPIRIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA)**

SKRIPSI

Mega Olla kelen

1602015175

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, ANGGARAN DAN
PENERIMAAN APBD TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
(STUDI EMPIRIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA)**

SKRIPSI

Mega Olla kelen

1602015175

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, ANGGARAN DAN PENERIMAAN APBD TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan berbagai bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 19 Desember 2020

Yang Menyatakan



(Mega Olla Kelen)

NIM 1602015175

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, ANGGARAN DAN PENERIMAAN APBD TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)**


NAMA : **MEGA OLLA KELEN**

NIM : **1602015175**

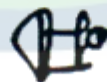
PROGRAM STUDI : **AKUNTANSI**

TAHUN AKADEMIK : **2019 – 2020**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian Skripsi :

Pembimbing I	Rito, S.E., Ak., M.Si., CA	 20/08/2020
Pembimbing II	Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Sumardi, S.E., M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, ANGGARAN DAN
PENERIMAAN APBD TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris
Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)**

Yang disusun oleh :
Mega Olla Kelen
1602015175

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitiaujian kesarjanaan strata satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.

DR. HAMKA

Pada tanggal 19 Desember 2020

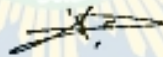
Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota :



(M. Nurasyidin, S.E., M.Si)

Sekretaris, merangkap anggota :



(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc)

Anggota :



(Dr. Yadi Nurhayadi, M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA



(Sumardi, S.E., M.Si)



(Dr. Zulpahmi., S.E., M.Si)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mega Olla Kelen
NIM : 1602015175
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty Free-Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, ANGGARAN DAN PENERIMAAN APBD TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA (Studi Empiris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalih media, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2020
Yang Menyatakan



(Mega Olla Kelen)
NIM 1602015175

ABSTRAK

Mega Olla Kelen (1602015175)

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, ANGGARAN DAN PENERIMAAN APBD TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA (Studi Empiris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA. 2020. Jakarta.

Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Anggaran, Penerimaan APBD dan Akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara desentralisasi fiskal, anggaran dan penerimaan APBD terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, anggaran dan penerimaan APBD sebagai variabel independen dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 data yang terdiri dari 1 (satu) provinsi dan menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa realisasi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan pengolahan data menggunakan *E-Views* 9 dan menghasilkan persamaan regresi $Y = 0.483292 + 0.029629X_1 - 0.004371X_2 - 3.08E-14X_3$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dengan nilai signifikan $0,311 > 0,05$. Anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dengan nilai signifikan $0,778 > 0,05$ dan penerimaan APBD secara parsial berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dengan nilai signifikan $0,010 < 0,05$. Variabel desentralisasi

fiskal, anggaran dan penerimaan APBD secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dengan nilai signifikan $0,017 < 0,05$. Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dilihat pada nilai *Adjusted R Square (Adjusted R²)* sebesar 0,6905 atau 69,05% yang artinya 69,05% variabel akuntabilitas pelaporan keuangan dijelaskan oleh desentralisasi fiskal, anggaran dan penerimaan APBD. Sedangkan sisanya 30,95% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang lebih erat kaitannya dengan akuntabilitas pelaporan keuangan, menambah tahun pengamatan dan menggunakan sample data dari provinsi selain provinsi DKI Jakarta.

ABSTRACT

Mega Olla Kelen (1602015175)

“THE INFLUENCE OF FISCAL DEZENTRALIZATION, BUDGET AND APBD REVENUE ON THE ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING IN INDONESIA (EMPIRICAL STUDY OF LOCAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA PROVINCE)”.

Thesis. Bachelor Degree Program of Accounting. Economic and Business Faculty of Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA. 2020. Jakarta

Keywords : Fiscal Decentralization, Budget, APBD Revenue, and Accountability

This study aimed to determine how the correlation between deferred fiscal decentralization, budget and APBD revenue to the selection of financial reporting accountability. The variables examined in this study are deferred fiscal decentralization, budget and APBD revenue as the independent variable and selection of financial reporting accountability as the dependent variable. The sample of this study amounted to 10 data consisting of 1(one) province and using purposive sampling method. The type of data used is secondary data in the form of financial statement of trade company in wholesale sub-sector. Data processing and analysis techniques used are descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis.

The result based on data processing E Views 9 and obtained the regression equation $Y = 0.483292 + 0.029629X_1 - 0.004371X_2 - 3.08E-14X_3$. The result indicates that deferred fiscal decentralization partially has a no effect on financial reporting accountability with a significant value of $0,311 > 0,05$. Budget partially has a no effect on financial reporting accountability with a significant $0,778 > 0,05$ and APBD revenue partially has a negative effect on financial reporting accountability with a significant $0,010 < 0,05$. Variables deferred fiscal decentralization, budget and APBD revenue simultaneously have a significant effect on financial reporting accountability with a significant value of $0,017 < 0,05$.

The ability of independent variables in explaining the dependent variable in explaining the dependent is in the adjusted R Square (adjusted R²) value of 0,6905 or 69,05%. Which means that 69,05% of the financial reporting accountability variable is explained by deferred fiscal decentralization, budget and APBD revenue. While the remaining 30,95% is explained by other factors not examined in this study.

Based on the result of this study, the authors provide some suggestion for further research that is expected to use other variables that are closely related to financial reporting accountability, increase the year of research and use data sample from province other than province DKI Jakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaraakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Karena atas rahmat serta hidayah yang telah diberikan oleh-Nya sehingga peneliti dapat menyusun skripsi hingga selesai dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Olla Kelen dan Ibu Misi Lawatu selaku orang tua serta keluarga tercinta yang selalu memberikan bantuan moral maupun material serta do'a dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti juga memperoleh dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro., M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi., S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Dr. Sunarta., S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Tohirin., S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Sumardi., S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Rito, S.E., Ak.,M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmu-ilmu yang

bermanfaat serta selalu memberikan masukan apabila ada kesalahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Ibu Meita Larasati, S.Pd.,M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan dukungan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat baik di dalam kelas maupun di luar kelas sehingga sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Widya, Yola, Ilmi selaku teman yang selalu setia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.
10. Yola, Ilmi, Dwi, Ais, Maulana dan Dean selaku teman seperjuangan akuntansi yang telah memberikan banyak pelajaran hidup selama tujuh semester yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas sehingga kita masih bersama sampai hari ini.
11. Serta semua pihak terkait yang membantu dalam proses penyusunan dari awal proposal skripsi sampai sekarang menjadi sebuah skripsi.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal soleh yang senantiasa mendapatkan ridho dari Alla SWT dan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan maupun kekeliruan, karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap, skripsi ini dapat dijadikan referensi dan sarana untuk menambah pengetahuan bagi pembaca maupun pihak yang bersangkutan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakaatuh

Jakarta, 19 Desember 2020

Peneliti



Mega Olla Kelen

NIM 1602015175

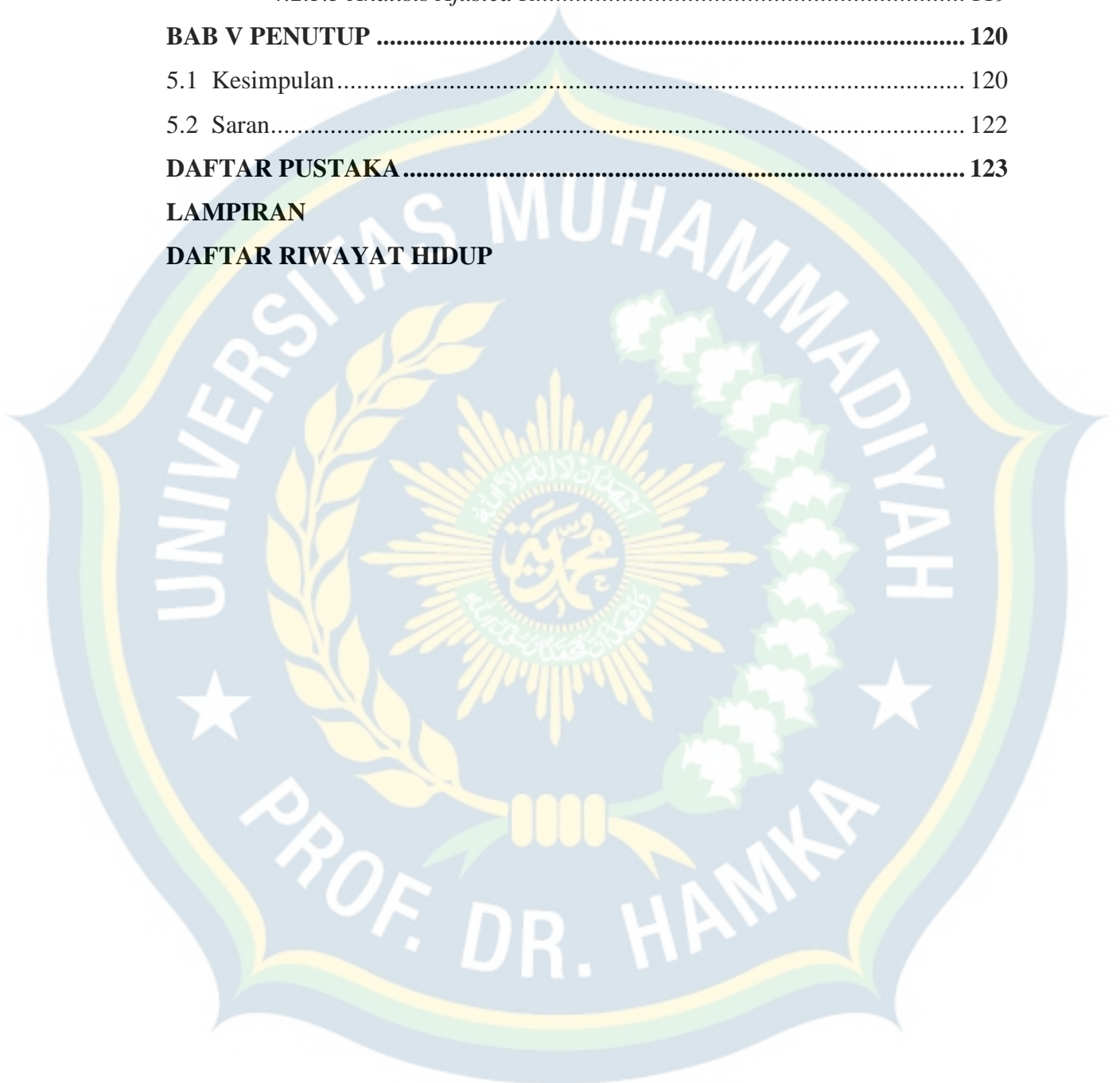
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	11
2.2 Telaah Pustaka.....	46
2.2.1 <i>Desertalisasi Fiskal</i>	46
2.2.1.1 <i>Pengertian Desentralisasi Fiskal</i>	46
2.2.1.2 <i>Tujuan Desentralisasi Fiskal</i>	47
2.2.1.3 <i>Derajar Desentralisasi Fiskal</i>	48

2.2.2 Anggaran.....	48
2.2.2.1 Pengertian Anggaran.....	48
2.2.2.2 Tujuan Anggaran.....	49
2.2.2.3 Manfaat Anggaran.....	50
2.2.2.4 Fungsi Anggaran.....	50
2.2.2.5 Langkah-langka Menyusun Anggaran.....	51
2.2.2.6 Anggaran Sektor Publik.....	52
2.2.2.7 Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	54
2.2.2.8 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik.....	55
2.2.2.9 Siklus Anggaran Sektor Publik.....	57
2.2.2.10 Jenis-jenis anggaran Sekto Publik.....	58
2.2.2.11 Efisiensi anggaran.....	59
2.2.3 Penerimaan APBD.....	60
2.2.3.1 Pengertian Penerimaan APBD.....	60
2.2.3.2 Sumber-sumber Penerimaan APBD.....	61
2.2.4 Akuntabilitas.....	67
2.2.4.1 Pengertian Akuntabilitas.....	67
2.2.4.2 Tujuan Akuntabilitas.....	68
2.2.4.3 Jenis-jenis Akuntabilitas.....	68
2.2.4.4 Dimensi Akuntabilitas.....	69
2.2.2.5 Opini Audit Laporan Keuangan.....	70
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	74
2.4 Rumusan Hipotesis.....	76
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	78
3.1 Metode Penelitian.....	78
3.2 Operasional Variabel.....	78
3.3 Populasi dan Sampel.....	80
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	81
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	81
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	81
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	82

3.5.1 Analisis Akuntansi.....	82
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif	82
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	83
3.5.4 Uji Hipotesis	87
3.5.5 Analisis Koefisien Korelasi.....	88
3.5.6 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	89
3.5.7 Adjusted R^2	90
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	91
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	91
4.1.1 Sejarah Provinsi DKI Jakarta	91
4.1.2 Geografi dan Iklim DKI Jakarta.....	93
4.1.3 Visi dan Misi Provinsi DKI Jakarta.....	95
4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	96
4.2.1 Hasil Pengolahan Data.....	96
4.2.1.1 Desentralisasi Fiskal	96
4.2.1.2 Anggaran.....	98
4.2.1.3 Penerimaan APBD	100
4.2.1.4 Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.....	102
4.2.2 Pembahasan	103
4.2.2.1 Analisis Akuntansi	103
4.2.2.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.....	103
4.2.2.3 Pengaruh Anggaran terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.....	105
4.2.2.4 Pengaruh Penerimaan APBD terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.....	106
4.2.2.5 Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Anggaran dan Penerimaan APBD terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	107
4.2.3 Analisis Statistik.....	109
4.2.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	109
4.2.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda	110

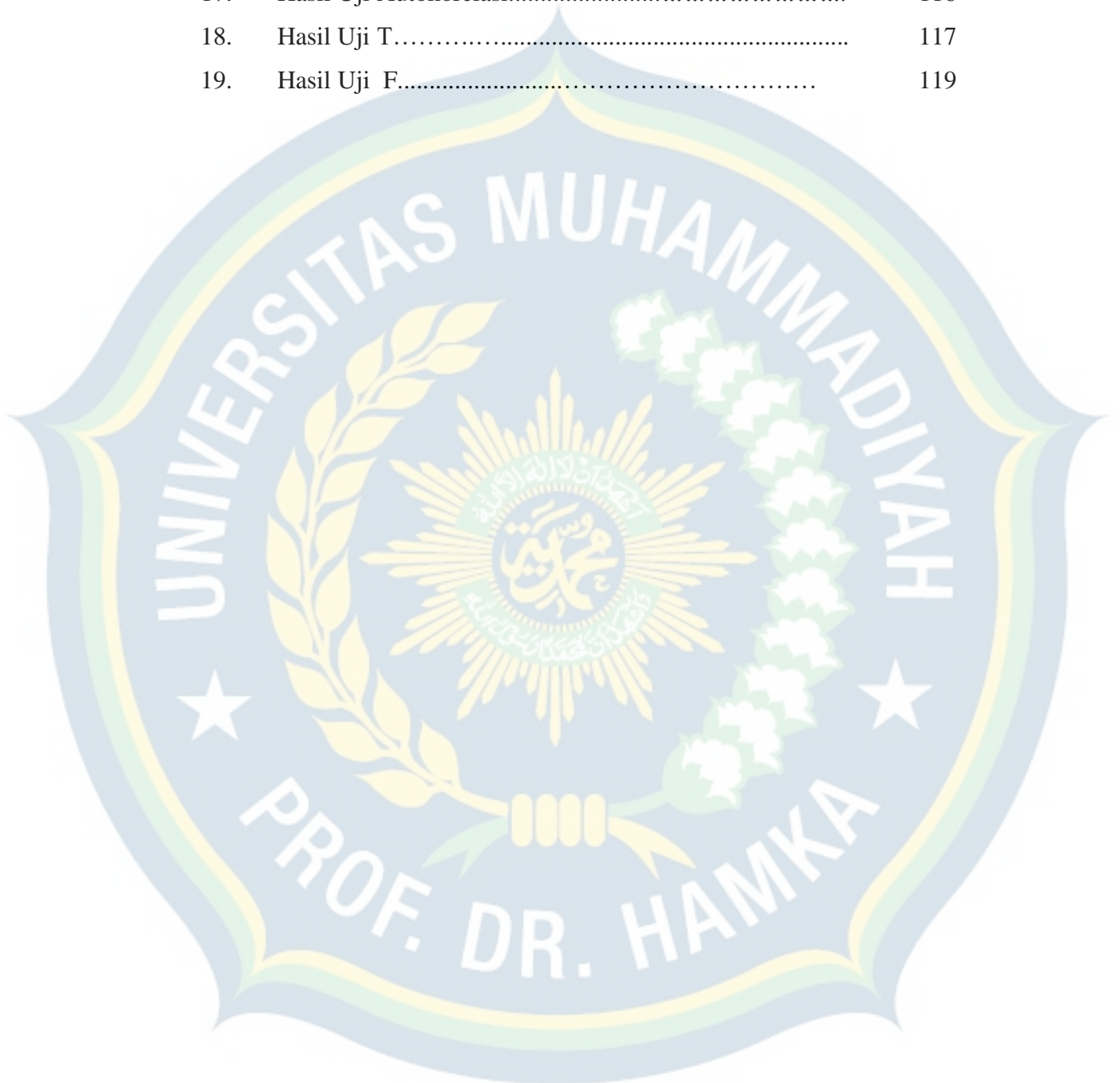
4.2.3.3 Uji Asumsi Klasik	112
4.2.3.4 Uji Hipotesis.....	117
4.2.3.5 Analisis Ajusted R.....	119
BAB V PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	31
2.	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal.....	48
3.	Operasionalisasi Variabel.....	79
4.	Pedoman Interpretasi Koefisien.....	89
5.	Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah provinsi DKI Jakarta 2010-2019.....	97
6.	Anggaran Pemerintah Daerah provinsi DKI Jakarta 2010-2019.....	99
7.	Penerimaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2019.....	100
8.	Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010-2019.....	102
9.	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2019.....	104
10.	Pengaruh Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2019.....	105
11.	Pengaruh Penerimaan APBD Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2019.....	106
12.	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Anggaran Dan Penerimaan APBD Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2010-2019.....	108
13.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	109
14.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	111

15.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	114
16.	Hasil Uji Heteroskedasitas.....	115
17.	Hasil Uji Autokorelasi.....	116
18.	Hasil Uji T.....	117
19.	Hasil Uji F.....	119



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis.....	75
2.	<i>Normal P-Plot of Regresion Standardized Residua.....</i>	113



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2010	1/18
2.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2011	3/18
3.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2012	4/18
4.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2013	5/18
5.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2014	6/18
6.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2015	7/18
7.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2016	8/18
8.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017	9/18
9.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2018	10/18
10.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2019	11/18
11.	Tabel Distribusi T.....	12/18
12.	Tabel Distribusi F.....	13/18
13.	Tabel Durbin-Watson (DW).....	14/18
14.	Surat Tugas.....	15/18
15.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul.....	16/18
16.	Lembar Konsultasi.....	17/18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas ialah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Era pemerintah saat ini akuntabilitas sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah baik dalam kinerja maupun dalam laporan keuangan. Akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintah, dari kondisi suatu pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan yang demokrasi. Di Indonesia, pelaksanaan otonomi sudah dilakukan sejak tahun 2001.

Badan Pemerintahan Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jakarta tahun anggaran 2018. Walaupun BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan 3 (tiga) permasalahan di dalam pengelolaan keuangan daerah seperti lemahnya investasi aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan pertama yaitu pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai. Masalah kedua adalah aset fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa tanah yang telah diserahkan kepada pemprov DKI, tapi masih dimanfaatkan oleh pengembang. Dan yang ketiga adalah Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu

Mahasiswa Unggul (KMU) masih di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari nilai aset dan anggaran.

Pada tahun 2018, aset DKI sebesar RP 497,43 triliun atau naik Rp 32,83 triliun ketimbang tahun sebelumnya. Sementara anggaran DKI di tahun yang sama mencapai Rp 82,26 triliun. Tunggakan faso-fasum telah menjadi catatan BPK sejak 2012. Waktu itu BPK memperkirakan tunggakan faso-fasum yang tidak jelas keberadaan dan pencatatannya nilai sekitar RP 22 triliun. Masalah yang sama kembali mencuat dalam audit BPK atas laporan keuangan DKI 2016. Kali ini, total tunggakan faso-fasum pemegang SIPPT di seluruh Jakarta mencapai 1.761 hektar. Sampai awal tahun lalu, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI mencatat tunggakan faso-fasum bernilai sekitar Rp 13 triliun. (Sumber:<https://fokus.tempo.co>, 17/05/2019 16:30 WIB).

Oleh karena itu pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatkan tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, (Putra, 2017). Maka dari itu jika terdapat laporan keuangan mendapatkan opini tidak wajar berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut UUD 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Negara Indonesia Menganut asas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Adapun tujuan desentralisasi yaitu mencegah adanya pemusatan keuangan di Pemerintah Pusat dan mengikut sertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Hal ini berarti desentralisasi sudah diterapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas, harus memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan dana baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun yang diterima dari pemerintah pusat (dana perimbangan) untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat (Erryana dan Setyawan, 2016).

Desentralisasi merupakan salah satu proses penting dalam perkembangan demokrasi disuatu negara agar demokrasi berjalan dengan baik, negara memerlukan strategi desentralisasi. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyelenggaraan fungsi pengeluaran pendapatan dari pemerintah ke daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal ini terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Fontanella dan Rossieta (2014) telah membuktika bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat ekonomi bagi Negara seperti peningkatan pertumbuhan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan. Dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal dalam bentuk tingkat kemandirian daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Secara parsial terkait peran moderasi kinerja, ditemukan bahwa kinerja penyelenggaraan Pemda memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan dalam bentuk opini audit yang baik. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019, pemerintah provinsi DKI Jakarta menerapkan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 74,77 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 51,12 triliun direncanakan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Rp 21,3 triliun dari dana perimbangan dan Rp 2,34 triliun dari pendapatan daerah lainnya. Menurut Maryanti (2013) bahwa, desentralisasi fiskal merupakan faktor yang penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya faktor desentralisasi fiskal maka suatu daerah akan memiliki kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah dan kegiatan pembangunan di daerah tanpa tergantung kepada pemerintah pusat.

Anggaran dapat terealisasi dengan baik apabila dalam penganggaran tersebut ada dukungan aktif dan pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah, dan hal tersebut menyangkut hubungan antara manusia dalam melaksanakan kegiatannya. Anggaran merupakan alat manajemen yang berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian, sedangkan penganggaran (*budgeting*) menunjukkan suatu proses penyusunan anggaran, yaitu sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang

diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dari rencana, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana tersebut.

Mardiasmo (2015:61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat pengendalian juga berfungsi sebagai instrument akuntabilitas atas dasar pengelolaan dana dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dipergunakan dana tersebut. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi yang bersangkutan dalam penggunaan dana dan bisa dipertanggungjawabkan melalui media pelaporan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari-31 Desember. Maka dari itu dalam satu tahun anggaran tersebut harus dapat direalisasi sehingga perencanaan keuangan tersebut dapat menjawab permasalahan pembangunan yang ada di daerah.

Akuntabilitas pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyiapkan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Akuntabilitas pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Beberapa penelitian mengenai desentralisasi fiskal, anggaran dan penerimaan (APBD) yang berpengaruh pada akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah dilakukan. Penelitian ini menguji kembali desentralisasi fiskal, anggaran dan pembiayaan (APBD) yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan.

Desentralisasi fiskal, anggaran dan penerimaan (APBD) yang diuji dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, efektifitas, efisien, anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Berdasarkan hasil pengujian Fadilah Putri Ananda (2018) dan Rita Friyani (2017) yang diukur dengan kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Nurfatin Salma Rufaida (2018), Tiara Mayangsari (2016) dan Purbasari dan Bawono (2017) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.

Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Berdasarkan hasil pengujian Muraiya dan Nadirsyah (2018) yang diukur dengan efektivitas penyerapan anggaran berpengaruh positif dan efisiensi penyerapan anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa efisien dan efektifitas penyerapan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniatul Mudhofar (2016) menyatakan bahwa efektivitas anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Penerimaan APBD ialah sejumlah uang yang masuk ke kas daerah atau hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Untuk variabel penerimaan APBD ini penulis belum menemukan jurnal yang mendukung apakah

berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan atau tidaknya. Provinsi DKI Jakarta dipilih karena mempunyai peluang dan kesempatan yang mendukung data penelitian. Berikut faktor yang mempengaruhi antara lain provinsi DKI Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi dan juga merupakan kota metropolitan dengan penduduk yang sangat padat. Alasan lain yang mendukung peneliti untuk memilih provinsi DKI Jakarta dikarenakan peneliti sebelumnya lebih cenderung menggunakan pemerintah daerah di luar dari provinsi DKI Jakarta, sehingga saya lebih dan sangat tertarik untuk memilih provinsi DKI Jakarta dan untuk mengetahui kesimpulan lebih tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Anggaran Dan Penerimaan (APBD) Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris Pemerintah DKI Jakarta)”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah penerimaan (APBD) berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

4. Apakah desentralisasi fiskal, anggaran, dan penerimaan (APBD) berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dengan pertimbangan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian, dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti membatasi penelitian yang akan dibahas yaitu Desentralisasi Fiskal, Anggaran, Penerimaan (APBD) terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pemda yang dijadikan sampel merupakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2019.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka dibuat rumusan masalah yang diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya mencari jawaban mengenai masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta 2014-2019?
2. Bagaimana pengaruh anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta 2014-2019?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan (APBD) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial penerimaan (APBD) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan desentralisasi fiskal, anggaran, dan penerimaan (APBD) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan wawasan keilmuan dibidang akuntansi mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat menambah atau melengkapi khasana teori yang telah ada dan diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mewujudkan akuntabilitas dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2017). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul H , Kusufi, M, S. (2016), *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah*. Jakarta : Salemba Empat
- Adha, B. R. (2016). *Pengaruh Independensi Auditor, Profesionalisme Auditor, Etika Profesi Auditor, Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.
- Ananda, F. P. (2018). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Transparansi dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kota Makassar)*. Skripsi Universitas Bengkulu.
- Athifah., Bayinah, A. N., & Bahri, E. S. (2017). *Pengaruh Akuntabilita Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Pada Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara*. Jurnal ISSN 2503-3077. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Azhari, A. S. (2015). *Perpajakn Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bird,R. (2014). *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erlina,I. Yahya., Ade, Fatma L., & Murni, D. (2018). *Fiscal Decentralization Implementation On Quality Regional Financial Report In Distric/ City Government (Case In Indonesia)*". Internasional journal of Civil Engineering and Technology Vol 9, Issue 9.
- Erryana, V., & Setyawan, H. (2016). *Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 5 No.1. Universitas Islam Sultan Agung.

- Friyani, R. (2017). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Good Governance Dan Standar Akuntabilitas Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi)*. Universitas Jambi.
- Harteti, Y., Darwanis., & Abdullah, S. (2014). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Hayes, R., & Et All. (2017). Prinsip-prinsip pengauditan. Jakarta: Salemba Empat.
- Hurley, P. J & Mayhew, B. W. (2018). *Realigning Auditors Accountability: Experimental Evidence. Article in the Accounting Review. Northeastern University*.
<https://fokus.tempco.co/read/1206502/dki-jakarta-raih-wtp-dari-bpk-tapi-masih-terbebani-problem-aset/full&view=ok>
- Jachi, M., & Yona, L. (2019). *The Impact of Independence of Internal Auditor on Transparency and Accountability Case of Zimbabwe Local Authorities. Journal of Finance and Accounting Vol. 10, No. 5 ISSN 2222. Midlands State University, Zimbabwe*.
- Khairudin., & Erlanda, R. (2016). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.7. No.2. Universitas Bandar Lampung.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Sektor Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2015) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Marselina,D. (2015). *Membeda APBD*. Graha Ilmu. Bandar Lampung.
- Mayangsari,T. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera)*. Skripsi Universitas Bengkulu.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di*

- Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. Akuntansi dan Investasi* Vol. 17 No. 2.
- Mulyana, Budi. (2016). *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta selatan.
- Muraiya., & Nadirsyah. (2018). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektifitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh*. Jurnal E-ISSN 2581-1002 Vol.3 No.2. Universitas Syiah Kuala.
- Nantharat,P & Et All. (2019). *Fiscal Decentralization And Economic Growth In Thailan A Cross-Region Analysis*. E-ISSN 1923-4031. Khon Kae University, Thailan.
- Nurfatin, S. R. (2018). *Pengaruh Politik Dinasti dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai Pemoderasi*. Skripsi Universiata Islam Negeri.
- Purbasari dan Bawono. (2017). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan*.
- Rahayu, S. K., & Suhayari, E. (2015). *Auditing (Konsep Dasar Dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rufaidah, N. S. (2018). *Pengaruh Politik Dinasti dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kinerja. Pemerintah Daerah Sebagai Pemoderasi*. Skripsi Universiata Islam Negeri.
- Sabila, K., & Jaya, W.K. (2014). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 15 No. 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

- Saputra, A., Utami, I., & Kristianti, I. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana*. Jurnal ISSN 2302-1810 Vol. 13 No.1. universitas Kristen Satya Wacana.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi. (2014). *Determinan Efektifitas Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Journal Of Rural And Development Vol.5 No.2. universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sunan, M., & Sunuk, A. (2017). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Yahya, I., & Et All. (2018). *Fiscal decentralization implementation on quality regional financial report in distric/ cit government (case in indonesia)*. international Journal Of Civil Engineering and Tecnology Vol.5 Issue 9.
- Yudha, D. M. A. K., Wirakusuma. M. D., & Rasmini, M. K. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Moderasi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana vol.5.8.